PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta – Padang Tujuh Telp./Fax. (0753) 466400

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan urusan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat adalah 14 (empat belas) kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.434.795.070,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.365.076.666,- atau 98,43%, untuk realisasi anggaran ada dua sub kegiatan dibawah 80 % yaitu sub kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta karena tidak adanya belanja perjalanan dinas yang tidak direalisasikan karena tidak ada undangan, kedepannya akan di susun perencanaan anggaran dengan matang, dan untuk pencapaian realisasi target kegiatan semuanya tercapai sesuai dengan yang direncanakan, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada uraian Tabel 3.1.1.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1				2	3	4	5	6	7
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.048.317.076 3.640.297.266 3.455.297.266 174.850.000 10.150.000 0 0	3.996.319.796 3.613.373.604 3.428.373.604 174.850.000 10.150.000 - 0 (98,72%) (94,01%) (99,22%) (100,00%) (100,00%) (0%) 0	Devisit anggaran	1. Dinas Tenaga Kerja bersama OPD terkait diharapkan dapat melaksanakan kegiatan pengawasan Tenaga Kerja Asing pada beberapa perusahaan di Kabupaten Pasaman Barat, baik kelengkapan semua perizinannya maupun retribusi pemakaian jasa tenaga kerja asing untuk peningkatan pendapatan asli daerah. 2. Perlu penegasan Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja kepada perusahaan – perusa	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1				2	3	4	5	6	7
						(0%)			<p>haan dalam penetapan dan pembayaran upah kepada karyawan berdasarkan Standar Upah Minimum Provinsi (UMP).</p> <p>Hasil tindaklanjut DPRD:</p> <p>1. Telah dilakukan pengawasan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat terkait dengan legalitas maupun dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat dilakukan pengawasan secara rutin, pengawasan bersama Tim Pora telah dilakukan</p>
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.958.000	21.804.500 (80,88%)	Tidak adanya undangan yg datang dan adanya pembatasan melakukan Bimtek	Kedepannya akan disusun perencanaan dengan matang	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26.958.000	21.804.500 (80,88%)	Tidak adanya undangan yg datang dan adanya pembatasan melakukan Bimtek	Kedepannya akan disusun perencanaan dengan matang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.031.520	253.148.940 (97,73%)			
				Penyediaan Komponem Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.470.000	1.470.000 (100,00%)			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.655.390	67.329.190 (98,07%)			

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1				2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.560.080	20.514.240 (99,78%)			sebanyak 1 kali dan Dinas Tenaga Kerja telah melakukan pengawasan sebanyak 1 kali. 2. Telah dilakukan sosialisasi dan himbauan Terkait Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepada perusahaan Yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	15.778.100	15.777.850 (100,00%)			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.567.950	148.057.660 (97,04%)			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.159.990	48.531.802 (83,45%)	Adanya sisa tagihan air dan listrik bln desember yg belum di bayarkan	Kedepannya akan disusun perencanaan dengan matang	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0 (0%)	Devisit anggaran		
				Penyediaan Jasa Komunikasi,	56.059.990	46.431.802	Adanya sisa	Kedepannya	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1				2	3	4	5	6	7
				Sumber Daya Air dan Listrik		(82,83%)	tagihan air dan listrik bln desember yg belum di bayarkan	akan disusun perencanaan dengan matang	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.100.000	2.100.000 (100,00%)			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.870.300	59.460.950 (93,10%)			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.635.300	23.261.500 (90,74%)			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.975.000	31.939.450 (94,01%)			
				Pemeliharaan Peralatan dan	4.260.000	4.260.000			

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1				2	3	4	5	6	7
				Mesin Lainnya		(100,00%)			
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	106.233.730	98.787.000 (92,99%)			
				Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	103.018.730	97.762.000 (94,90%)			
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	100.958.730	96.782.000 (95,86%)			
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prsarana Lembaga Pelatihan Kerja	2.060.000	980.000 (47,57%)	Adanya belanja perjalanan dinas yang tidak direalisasi karena tidak ada undangan	Kedepannya akan disusun perencanaan dengan matang	
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3.215.000	1.025.000 (31,88%)	Adanya belanja perjalanan dinas yg tidak	Kedepannya akan disusun perencanaan dengan matang	

NO	URUSAN PEMERIN TAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1				2	3	4	5	6	7
							direalisasikan karena tidak ada undangan		
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3.215.000	1.025.000 (31,88%)	Adanya belanja perjalanan dinas yang tidak direalisasikan karena tidak ada undangan	Kedepannya akan disusun perencanaan dengan matang	
				Program Penempatan Kerja	265.696.464	256.824.870 (96,66%)			
				Pelayanan Antar Kerja Didaerah Kabupaten/Kota	255.000.464	247.919.870 (97,22%)			
				Perluasan kesempatan kerja	255.000.464	247.919.870 (97,22%)			
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	10.696.000	8.905.000 (85,03%)	Adanya sisa pembayaran narasumber, biaya perjalanan dinas	Kedepannya akan disusun perencanaan dengan matang	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1				2	3	4	5	6	7
							biasa, dalam kota dan BBM yg tidak bisa direalisasikan		
				Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1.470.000	1.250.000 (85,03%)	Adanya sisa biaya perjalanan dinas biasa yg tidak bisa direalisasikan	Kedepannya akan disusun perencanaan dengan matang	
				Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	9.226.000	7.655.000 (82,97%)	Adanya sisa pembayaran narasumber, biaya perjalanan dinas biasa, dalam kota dan BBM yg tidak bisa direalisasikan	Kedepannya akan disusun perencanaan dengan matang	
				Program Hubungan Industrial	7.192.800	6.590.000 (91,62%)			

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1				2	3	4	5	6	7
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.010.000	1.975.000 (98,26%)			
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jmainan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	2.010.000	1.975.000 (98,26%)			
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogol Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	5.182.800	4.615.000 (89,04%)	Adanya sisa BBM dan perjalanan dinas dalam kota	Kedepannya akan disusun perencanaan dengan matang	
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.182.800	4.615.000 (89,04%)	Adanya sisa BBM dan perjalanan dinas dalam kota	Kedepannya akan disusun perencanaan dengan matang	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1				2	3	4	5	6	7
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	0	0 (0%)	Devisit anggaran		
2	Transmigrasi		UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrans migrasian	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	7.355.000	6.555.000 (89,12%)	Adanya sisa perjalanan dinas biasa dan dalam kota yg tidak direalisasikan	Kedepannya akan disusun perencanaan dengan matang	
				Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	7.355.000	6.555.000 (89,12%)	Adanya sisa perjalanan dinas biasa dan dalam kota yg tidak direalisasikan	Kedepannya akan disusun perencanaan dengan matang	
				Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	7.355.000	6.555.000 (89,12%)	Adanya sisa perjalanan dinas biasa dan dalam kota yg tidak direalisasikan	Kedepannya akan disusun perencanaan dengan matang	
				JUMLAH	4.434.795.070	4.365.076.666			

3.2 Kebijakan Strategis yang Diterapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam tabel 3.3.3 sebagai berikut:

No	Kebijakan	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Peningkatan penempatan tenaga kerja	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja
2	Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan pemagangan standarisasi kompetensi dan pengembangan	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Meningkatkan kualitas tenaga kerja
3	Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan
4	Peningkatan kesejahteraan masyarakat eks Transmigrasi	UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrans migrasian	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat eks Transmigrasi

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1 (Tahun 2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Dinas Tenaga Kerja bersama OPD terkait diharapkan dapat melaksanakan kegiatan pengawasan Tenaga Kerja Asing pada beberapa perusahaan di Kabupaten Pasaman Barat, baik kelengkapan semua perizinannya maupun retribusi pemakaian jasa tenaga kerja asing untuk peningkatan pendapatan asli daerah.	Telah dilakukan pengawasan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat terkait dengan legalitas maupun dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat dilakukan pengawasan secara rutin, pengawasan bersama Tim Pora telah dilakukan sebanyak 1 kali dan Dinas Tenaga Kerja telah melakukan pengawasan sebanyak 1 kali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menertibkan keberadaan dan legalitas tenaga kerja sesuai peraturan yang berlaku 2. Untuk menciptakan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan perusahaan asing mengenai penggunaan tenaga asing.
2.	Perlu penegasan Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja kepada perusahaan – perusahaan dalam penetapan dan pembayaran upah kepada karyawan berdasarkan Standar Upah Minimum Provinsi (UMP).	Telah dilakukan sosialisasi dan himbauan terkait Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.	Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.